BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa telah diberikan hak dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, diuraikan bahwa desa memiliki otoritas dalam hal pengelolaan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan warga desa (Usaha et al., n.d.). Potensi yang dimiliki oleh desa sebagai sumber daya harusnya dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pemangku kepentingan untuk mencapai majunya infrastruktur yang merata. Oleh karena itu, perluk usaha yang teratur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di desa. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menetapkan bahwa BUMDesa merupakan badan hukum yang dibentuk oleh desa atau gabungan beberapa desa. Badan ini berfungsi untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, meningkatkan produktivitas, serta menyediakan layanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Presiden RI, 2021).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes). UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang pembangunan BUMDes, untuk mendorong desa guna memiliki dan mengelola BUMDes merupakan suatu langkah strategis untuk menggali potensi dan meningkatkan perekonomian tingkat desa. BUMDes berperan sebagai lembaga yang memfasilitasi hubungan ekonomi antara masyarakat dan pemerintah desa, sehingga tercipta interaksi hasrmonis antara keduanya (Engkus et al., 2021).

Pada awal tahun 2015, desa mulai memperoleh alokasi anggaran baru berupa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola dana tersebut secara bertahap. Penggunaan Dana Desa tidak hanya difokuskan pada program ekonomi, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas layanan publik. Desa diharuskan untuk mengidentifikasi produk unggulan di wilayahnya sebagai salah satu prioritas dalam pelaksanaan program Dana Desa. Salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung perekonomian desa adalah melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Ekonomi & Cendana, 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa. Pembentukan BUMDes

didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sehingga menjadi pilar utama dalam aktivitas ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang bersifat sosial (social institution) dan komersial (commercial institution) (Arista et al., 2021). Pendirian BUMDes adalah salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa, terutama karena desa sekarang memiliki otonomi penuh dan perlu mengelola keuangan secara mandiri. Diharapkan, BUMDes dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan yang efisien, termasuk dalam aspek keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi fokus utama dalam evaluasi kinerja keuangan BUMDes melalui laporan keuangan yang disajikan (Arista et al., 2021).

Ada empat tujuan utama dari pendirian BUMDes, yaitu untuk memperbaiki perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di pedesaan(Amin, 2019).

Pengembangan ekonomi di Indonesia sebaiknya tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan perluasan dan pemerataan aktivitas ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terpusat pada wilayah dan kelompok tertentu, padahal ketimpangan

ekonomi dapat menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat.

Pemberdayaan BUMDes merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyebarkan kegiatan ekonomi hingga ke tingkat desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi BUMDes sebagai entitas ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Akuntansi Desa mencatat proses transaksi yang terjadi di desa, yang kemudian dibuktikan dengan bukti transaksi seperti nota-nota, lalu dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan desa berfungsi sebagai sarana transparansi dan merupakan bagian dari akuntabilitas yang mendukung keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya publik.

Salah satu fokus perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan pedesaan adalah pengalokasian dana keuangan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Dana ini diberikan secara bertahap dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap desa, berdasarkan sejumlah faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas

wilayah, dan kondisi geografis, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta meratakan infrastruktur di desa.

Desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas realisasi anggaran dan penggunaan dana tersebut. Laporan ini harus mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan dari laporan keuangan desa adalah untuk menyajikan informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan periode yang relevan. Laporan ini juga mendukung tercapainya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga akuntansi desa dapat diterima dan diakui dengan cepat. Pertanggungjawaban keuangan desa disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAP Desa). SAP Desa disusun secara independen oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Proses penyusunan SAP Desa mengikuti prosedur yang baku, sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dari KSAP.

Penelitian yang dilakukan oleh Denok Kurniasih mengungkapkan bahwa kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) belum mencapai optimal. Banyak masyarakat berpendapat bahwa hasil kerja BUMDes masih tergolong rendah. Kinerja yang kurang optimal ini disebabkan oleh ketidakmampuan pengelola dalam mencapai efisiensi, efektivitas, ekonomi, responsivitas, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari pemanfaatan sumber daya lokal desa yang masih belum optimal, manfaat yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Selain itu, kinerja pengelolaan BUMDes juga terkendala oleh dominasi perangkat desa dalam proses pengelolaannya. Dominasi ini muncul akibat adanya ambiguitas peran dan konflik dalam organisasi, yang membuat prinsip privatisasi dalam pengelolaan BUMDes sulit diterapkan secara optimal. Sebagai akibatnya, pengelolaan BUMDes belum berjalan secara profesional dan bertanggung jawab (Siahainenia & Si, 2020).

Hal serupa juga dirasakan di Desa Botto Mallangga. Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 23,75 km^2 dan dihuni oleh sekitar lima ratus kepala keluarga yang tersebar di enam dusun, yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dusun Sarassang, dan Dusun Jati.

Awal sejarah berdirinya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDES di desa Botto Mallangga berdiri pada tahun 2019 dengan unit usaha TOKO GROSIR BUMDES SARASSANG DESA BOTTO MALLANGGA, adanya unit usaha toko grosir ini merupakan dampak dari terlalu jauhnya tempat toko grosir murah dari Desa Botto Mallangga.(Desa & Nibung, 2021) Kemudian, sumber dana dari toko ini hanya dari dana desa, adapun petugas atau karyawan toko ini ada 2 orang dan gaji karyawan bersumber dari dana BUMDes. Toko grosir BUMDes dipindahkan sementara di bawah rumah warga bernama pak Agung, sedangkan toko baru nya masih sementara dibangun. Berdasarkan hasil rapat, menyetujui untuk mentiadakan sistem simpan pinjam, alasannya karena pengembalian dana yang dipinjam warga susah dikembalikan karena warga berasumsi bahwa uang yang dipakai untuk BUMDes itu berasal dari uang negara yang berasal dari pajak rakyat jadi tidak usah dikembalikan. Untuk menghindari kerugian maka toko grosir ini tidak menerima transaksi dalam bentuk bon.

Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mencakup empat prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keteraturan dan kedisiplinan dalam penganggaran(Ivan *et al.,* 2022).

Melalui pengalokasian dana desa, desa dan kelurahan mendapatkan kesempatan untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan kegiatan sosial secara mandiri. Alokasi dana desa merupakan dana yang diberikan kepada desa melalui dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini merupakan upaya untuk memenuhi hak desa dalam menjalankan otonomi, sehingga desa dapat berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini didorong oleh keberagaman, partisipasi, otonomi yang sejati, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat peran Pemerintah Desa dalam memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dana ini juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan serta pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis (Di et al., 2020).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola laporan keuangan di BUMDes Desa Bottomallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang?
2. Apakah BUMDes di Desa Bottomallangga menerapkan Standar Akuntansi BUMDes ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan laporan keuangan dan pengembangan usaha BUMDes di Desa Bottomallangga?
4. Bagaimana peluang usaha yang ada untuk pengembangan BUMDes di Desa Bottomallangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola laporan keuangan di BUMDes Desa Bottomallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi BUMDes di BUMDes Desa Bottomallangga.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan laporan keuangan dan pengembangan usaha BUMDes di Desa Bottomallangga
4. Untuk mengidentifikasi peluang usaha yang ada untuk pengembangan BUMDes di Desa Bottomallangga

D. Manfaat Penelitian

1. **Bagi masyarakat desa:** Peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur melalui pengelolaan Dana Desa dan BUMDes yang lebih baik, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes untuk kepentingan bersama.
2. **Secara praktis:** Memberikan panduan bagi pengelola BUMDes di Desa Bottomallangga untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa.
3. **Bagi pengelola BUMDes:** Membantu pengelola BUMDes untuk memperbaiki pengelolaan laporan keuangan, serta memberikan wawasan terkait peluang dan kendala dalam pengembangan usaha BUMDes.
4. **Bagi pengembangan BUMDes:** Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes dan memberi rekomendasi yang berguna dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes secara berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Akuntansi Desa

Akuntansi desa merujuk pada sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun laporan transaksi keuangan di tingkat desa. Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa penerapan akuntansi yang efektif di tingkat desa sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Istilah "akuntansi" berasal dari bahasa Inggris "*accounting*," yang berarti proses perhitungan, sedangkan individu yang menjalankan kegiatan akuntansi disebut sebagai akuntan. *American Accounting Association* (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Akuntansi desa mencakup proses pencatatan transaksi yang berlangsung di tingkat desa, yang kemudian didokumentasikan melalui nota dan disusun dalam laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan desa. Pihak-pihak tersebut meliputi

Masyarakat Desa, Perangkat Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. Di Desa Botto Mallangga, tantangan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dalam memahami prinsip-prinsip akuntansi menandakan adanya kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa, menurut IAI-KASP (2015:7-8), terdiri dari beberapa aturan yang mendasari pelaksanaan akuntansi di tingkat desa, yaitu sebagai berikut:

a. **Prinsip Harga Perolehan**. Prinsip ini menetapkan bahwa harga perolehan untuk aset, kewajiban/utang, dan pendapatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam transaksi. Harga perolehan yang ditetapkan memiliki nilai objektif, sejalan dengan jumlah uang yang dikeluarkan atau dibayarkan baik kas atau bank.
b. Prinsip Realisasi Pendapatan. Prinsip ini menjelaskan cara untuk mengukur dan menentukan nilai pendapatan yang diperoleh. Pendapatan diukur berdasarkan peningkatan aset, pengurangan utang, atau bertambahnya uang kas. Pada tingkat pemerintahan desa, pencatatan pendapatan dasarnya dilakukan ketika transaksi terjadi, yang dapat dilihat dari jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip Objektif. Prinsip ini menekankan pentingnya laporan keuangan yang didasarkan pada bukti nyata dari setiap transaksi yang terjadi. Tanpa adanya bukti transaksi, pencatatan transaksi tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian dari pihak internal guna mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merusak integritas bukti transaksi dan pencatatnya.

d. **Prinsip Pengungkapan Penuh**. Dalam penyusunan laporan keuangan, penting untuk menyajikan informasi secara menyeluruh, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, adar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan tepat.

e. **Prinsip Konsistensi**. Sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan, penting untuk memastikan bahwa penerapan metode, pedoman, dan standar yang digunakan tetap konsisten. Laporan keuangan juga harus memiliki nilai perbandingan, yang berarti bahwa laporan ini dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari pemerintah desa lain pada periode yang sama, maupun sebaliknya (Amin & Astuti, 2021).

2. **Kualitas SDM**

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merujuk pada kemampuan individu untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal berdasarkan keterampilan, pengetahuan, sikap,

serta komitmen yang dimiliki. Menurut *Noe, Hollenbeck, Gerhart, dan Wright* (2020), kualitas SDM berfokus pada kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Menurut Salim (1996:35), kualitas sumber daya manusia mencerminkan nilai perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan segala tindakannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan berbangsa. Sementara itu, menurut Matindas (1997:93), kualitas sumber daya manusia juga diukur kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri serta mendorong perkembangan orang lain. SDM mencakup semua individu yang merupakan anggota atau penduduk suatu negara atau wilayah tertentu, yang mencapai usia kerja, baik mereka yang sudah bekerja maupun yang belum. SDM juga merujuk pada individu yang terlibat dalam suatu organisasi, seperti personel, pegawai, atau karyawan. Kualitas dan kuantitas SDM yang ada saat ini serta yang akan datang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya.

Salah satu cara untuk memahami eksistensi suatu organisasi atau perkumpulan adalah dengan memanfaatkan potensi fisik dan mentalnya, di mana SDM menjalani berbagai pelatihan, salah satunya disebut kerja. Dengan demikian, manusia menjadi aset yang berbeda, baik sebagai aset material maupun finansial bagi suatu organisasi atau perusahaan. SDM yang efektif adalah mereka yang mempunyai ilmu yang baik tentang dasar-dasar pembukuan. Jika sebuah negara memiliki SDM yang berkualitas dan mampu mengelola aset-aset regulernya, maka perekonomian negara tersebut dapat lebih berkembang dibandingkan negara lain yang meskipun memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki SDM yang berkualitas. Dalam menjalankan organisasi, salah satu faktor utama adalah SDM. Meskipun sebuah perusahaan, industri, atau organisasi memiliki peralatan canggih dan memadai, jika SDM-nya tidak berkualitas, semua itu akan menjadi sia-sia. (Ramadani *et al.,* 2022) Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kualitas SDM antara lain:

a. Pendidikan dan Keterampilan: Pendidikan yang baik meningkatkan kapasitas intelektual dan keterampilan teknis seseorang. Pelatihan yang kontinu juga penting untuk menjaga keterampilan tetap relevan dengan kebutuhan pasar yang selalu berubah (Shin, 2022).

b. Pengalaman Kerja: Pengalaman kerja memberi wawasan praktis yang meningkatkan kapasitas seseorang dalam menghadapi situasi nyata dan kompleks di tempat kerja (Shin & Kim, 2021).
c. Kesejahteraan dan Keseimbangan Kerja-Hidup: Kualitas SDM juga dipengaruhi oleh kesejahteraan fisik dan mental pekerja. Program yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan (Yoon & Lee, 2023).

Dalam organisasi modern, kualitas SDM tidak hanya diukur dari sisi pengetahuan atau keterampilan teknis, tetapi juga dari bagaimana individu dapat beradaptasi dengan perubahan, bekerja dalam tim, dan berinovasi. *Kraemer & Slaughter* (2021) menjelaskan bahwa kualitas SDM yang baik mempengaruhi efektivitas tim dan kinerja organisasi, serta kemampuan organisasi dalam berkompetisi di pasar global yang dinamis.

Menurut *Tang, Li, dan Zhao* (2020), pengukuran kualitas SDM saat ini semakin bergeser untuk tidak hanya melihat aspek kuantitatif (seperti ujian dan tes keterampilan), tetapi juga pada aspek kualitatif, seperti kreativitas, fleksibilitas, dan

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar.

3. **Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang sangat penting bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak eksternal dan internal, seperti investor, kreditor, dan manajer perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa elemen, seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2020). Menurut Harrison & Horngren (2021), laporan keuangan berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan serta elemen-elemen yang mempengaruhi posisi keuangan dan arus kas perusahaan.

Laporan keuangan merupakan pencatatan akuntansi dari sebuah entitas selama periode akuntansi tertentu yang mencerminkan kinerjanya. Laporan keuangan bisa diartikan sebagai uraian yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Berdasarkan PSAK 2015 No.1, kualitas laporan keuangan dijelaskan sebagai ringkasan informasi yang terorganisir mengenai posisi dan

kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan mencakup berbagai karakteristik, antara lain:

a. Dapat dipahami

Laporan keuangan disusun dengan bahasa yang jelas dan istilah yang mudah dimengerti, sehingga bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman berbagai pihak yang menggunakannya.

b. Relevan

Ini berarti bahwa laporan keuangan yang disusun harus saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam pengambilan keputusan. Laporan tersebut dianggap penting jika informasi yang terkandung didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan cara menilai kejadian di masa lalu ata saat ini, serta memperkirakan kondisi di masa depan dan memperbaiki penilaian yang telah dibuat sebelumnya.

c. Keandalan

Ini berarti informasi yang disajikan harus jelas, bebas dari kesalahan material, dan dapat dipercaya oleh pengguna. Informasi akuntansi dianggap andal jika mampu mengungkapkan kebenaran dengan bebas dari kesalahan, serta disajikan secara objektif dan jujur.

d. Dapat dibandingkan

Ini berarti pengguna harus memiliki kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan dari periode ke periode, sehingga dapat mengidentifikasi dan memahami perubahan serta posisi kinerja keuangan yang ada.

Laporan keuangan dapat dianggap baik jika informasi yang disajikan mudah dipahami, mampu membantu pengguna dalam pengambilan keputusan, bebas dari penafsiran yang membingungkan, serta terhindar dari kesalahan material, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.(Ramadani *et al.*, 2022) Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi utama:

a. Menilai Kinerja Keuangan: Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada periode tertentu, baik dari aspek profitabilitas, efesiensi, maupun solvabilitas (Harrison & Horngren, 2021).
b. Dasar Pengambilan Keputusan: Laporan keuangan menyediakan data yang diperlukan bagi pengambilan keputusan, baik oleh manajer internal maupun oleh pihak eksternal seperti investor dan kreditor (Sharma, 2023).
c. Pemenuhan Kewajiban Hukum: Perusahaan harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi yang berlaku guna memastikan transparansi dan akuntanbilitas (Wolk, Dodd, & Rozycki, 2022).

Komponen Laporan Keuangan Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait:

a. Neraca *(Balance Sheet*): Menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu, dengan menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham (Wolk *et al*., 2022).
b. Laporan Laba Rugi *(Income Statement*): Menyajikan hasil kinerja perusahaan dalam periode tertentu, diantaranya pendapatan, biaya, serta laba atau rugi yang diperoleh (Kieso *et al*., 2020).
c. Laporan Arus Kas *(Cash Flow Statement):* memberikan informasi mengenai arus kas yang masuk dan keluar dari kegiatan operasi, investasi, serta pendanaan dalam periode tertentu (Sharma, 2023).
d. Laporan Perubahan Ekuitas *(Statement of Changes in Equity)*: Menyajikan perubahan ekuitas pemegang saham selama periode pelaporan (Wolk *et al*., 2022).

Standar akuntansi, seperti IFRS (*International Financial Reporting Standars*), memberikan aturan yang

harus diikuti oleh perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, yang mempengaruhi cara penyajian, pengukuran, dan pengungkapan informasi keuangan. Standar ini menjamin bahwa laporan keuangan yang disusun bersifat konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain(Kieso *et al*., 2020).

Kualitas laporan keuangan sangat penting karena menentukan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas harus mencerminkan keadaan keuangan perusahaan secara akurat dan relevan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan antara lain transparansi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta kebijakan pengungkapan yang jujur dan tepat waktu (Hassan, 2022).

4.Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha merujuk pada kegiatan yang mencakup pencarian, pemeliharaan, dan perolehan pelanggan serta peluang bisnis baru dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Setiap langkah yang diambil dalam pengembangan usaha berfokus pada upaya membuat bisnis lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan strategi yang matang

dalam pengembangan usaha sangat penting, karena ini bisa menjadi faktor penentu kesuksesan bisnis. Tanpa strategi yang jelas, upaya pengembangan bisnis akan menjadi sulit dan tidak efisien, terutama dalam menentukan peluang bisnis yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi Indonesia, fokus pengembangan tidak hanya pada pertumbuhan, tetapi juga pada perluasan dan pemerataan kegiatan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang masih terkonsentrasi pada wilayah atau kelompok tertentu berisiko menambah kesenjangan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi pengembangan usaha antara lain :

a. Inovasi dan Teknologi: Inovasi produk, layanan, dan proses bisnis, serta penerapan teknologi baru dapat menjadi pendorong utama dalam pengembangan usaha. *Lichtenstein & Lyons* (2022) menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi teknologi terbaru memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan pasar.
b. Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM yang dimiliki oleh perusahaan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan usaha. Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterampilan dan

pengetahuan yang mendukung pertumbuhan perusahaan (Salman *et al*., 2021).

c. Kapasitas Finansial: Pengembangan usaha memerlukan dana yang cukup untuk ekspansi dan investasi dalam penelitian, pemasaran, dan teknologi. Akses terhadap sumber pembiayaan, baik itu melalui modal sendiri maupun pinjaman, memainkan peran penting dalam kesuksesan pengembangan usaha (Teece, 2023).
d. Strategi Pemasaran: Dalam pengembangan usaha, sangat penting untuk memahami dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif guna menarik pelanggan baru serta mempertahankan pelanggan sebelumnya (Liu *et al*., 2020).

Adapun strategi Pengembangan Usaha antaralain yaitu :

a. Ekspansi Pasar: Salah satu strategi utama dalam pengembangan usaha adalah ekspansi pasar, baik itu secara geografis (masuk ke pasar baru) maupun segmen pasar (menjangkau pelanggan baru). Menurut *Miller & Friesen* (2021), ekspansi pasar membantu perusahaan meningkatkan pendapatan dan mencapai skala ekonomi.
b. Diversifikasi: Diversifikasi produk atau layanan dapat mengurangi ketergantungan perusahaan pada satu produk atau pasar dan membuka peluang baru. *Harrison & Leitch*

(2023) menjelaskan bahwa diversifikasi yang terencana dengan baik dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan mengurangi risiko.

c. Kemitraan dan Aliansi Strategis: Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan lain atau membentuk aliansi strategis dapat mempercepat proses pengembangan usaha, terutama dalam hal akses ke sumber daya atau teknologi yang lebih baik (Smith, 2020).

Strategi pengembangan adalah proses yang bertujuan meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengintegrasikan keinginan individu untuk tumbuh dan berkembang sejalan dengan tujuan organisasi. Proses ini secara khusus mencakup usaha perubahan yang direncanakan, yang melibatkan keseluruhan sistem organisasi dalam periode tertentu dan berhubungan erat dengan misi organisasi. Perumusan strategi menjadi sangat penting setelah perusahaan memahami ancaman yang dihadapi, peluang yang ada, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Langkah-langkah dalam perumusan strategi mencakup penentuan misi perusahaan, penetapan tujuan yang ingin dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Proses perumusan strategi pengembangan dapat dilakukan dengan merumuskan visi, misi,

tujuan, strategi, dan kebijakan secara menyeluruh dalam organisasi.(Iskandar *et al.,* 2021)

Keberhasilan pengembangan usaha dapt diukur melalui beberapa indikator, seperti peningkatan pendapatan, pangsa pasar, kapasitas produksi, dan tingkat kepuasan pelanggan. *Zhang & Xie* (2022) menyarankan penggunaan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan untuk mengevaluasi dampak dari strategi pengembangan yang diterapkan.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah badan usaha yang mayoritas atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, dengan tujuan untuk mengelola aset, menyediakan layanan, dan menjalankan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah usaha yang didirikan oleh pemerintah desa, di mana modal dan pengelolaannya dimiliki oleh desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh desa, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan

masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai pengelola potensi desa, yang dapat meliputi berbagai jenis usaha, seperti pertanian, perdagangan, pariwisata, atau pengelolaan sumber daya alam. Menurut Sutrisno & Sari (2022), BUMDes merupakan bentuk desentralisasi ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal. BUMDes memiliki berbagai fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi desa, di antaranya:

a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: BUMDes berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa dengan menciptakan peluang kerja dan usaha baru (Rachman, 2020).
b. Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik: BUMDes juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan, pasar, atau fasilitas umum lainnya yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Setiawan, 2021).
c. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes): BUMDes dapat menjadi sumber utama pendapatan desa, yang membantu mengurangi ketergantungan pada dana alokasi dari pemerintah pusat atau daerah (Sutrisno & Sari, 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengelola berbagai jenis usaha yang terkait dengan potensi desa, seperti berikut ini :

a. Usaha Produksi dan Jasa: BUMDes dapat mengelola usaha pertanian, kerajinan tangan, atau produksi lainnya yang melibatkan masyarakat desa secara langsung (Tariq & Hossain, 2023).
b. Usaha Layanan Umum: Selain usaha komersial, BUMDes juga bisa menjalankan usaha yang bersifat sosial, seperti pengelolaan air bersih, pengolahan sampah, dan distribusi bahan pokok (Sanjaya, 2022).
c. Kerjasama dan Kemitraan: BUMDes dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta atau pemerintah dalam mengembangkan usahanya, terutama dalam sektor pariwisata atau pengelolaan sumber daya alam (Rachman, 2020).

Pengembangan BUMDes menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas manajerial dan keterampilan pengelola BUMDes masih menjadi kendala dalam mengembangkan usaha dengan skala besar dan berkelanjutan (Tariq & Hossain, 2023).

b. Pembiayaan dan Modal Awal: Sumber dana untuk mendirikan dan mengelola BUMDes seringkali terbatas, yang mempengaruhi kapasitas usaha untuk berkembang (Setiawan, 2021).
c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Pengelolaan BUMDes yang tidak transparan dapat menyebabkan penyalahgunaan dana dan merugikan masyarakat desa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan akuntabilitas menjadi sangat penting (Sanjaya, 2022).

BUMDes tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga berperan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut *Nurmanti & Suryana* (2023), pengelolaan BUMDes yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dapat mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menjalankan usaha, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa.

B. Penelitian Terdahulu

1. Fitria, A., & Andriani, R. (2020): "Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap BUMDes". Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

   Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Mayoritas masyarakat cenderung mendukung program BUMDes ketika mereka merasa informasi keuangan disajikan secara jelas dan terbuka.

2. Handayani, W. (2021): "Peran Laporan Keuangan dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Studi Kasus di Desa X". Jurnal Akuntansi dan Keuangan.

   Hasil Penelitian: Menggunakan studi kasus di Desa X, penulis menemukan bahwa laporan keuangan yang akurat dan tepat saat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. BUMDes yang memiliki sistem pelaporan yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengelola sumber daya juga meningkatkan layanan kepada masyarakat.

3. Kusumawati, D., & Pratiwi, M. (2022): "Pengembangan BUMDes dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Desa". Jurnal Administrasi Publik.

   Hasil Penelitian: Menyimpulkan bahwa pengembangan BUMDes yang efektif berhubungan erat dengan pemanfaatan

laporan keuangan yang baik. Penelitian ini menunjukkan bahwa desa yang menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi desa.

4. Walmi Sholihat & Fatti Corrina (2021) : " Analisis Faktor Yang Mempengaruh Kualitas Laporan Keuangan BUMDES Sekecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu"

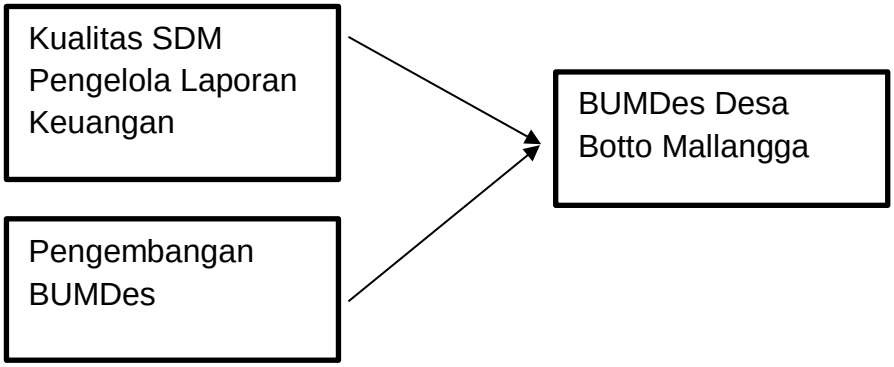
   Hasil Penelitian : Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan secara terpisah memiliki pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan BUMDes Sekecamatan Pasir Penyu.

5. Selfika Herianti 2023 : " Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Permata Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya"

   Hasil Penelitian: Kegiatan perencanaan BUMDes Permata dilakukan hanya saat ada tambahan modal. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara BUMDes yang mencatat semua transaksi unit usaha sekali sebulan dan memeriksanya saat rapat bulanan. Laporan Pertanggungjawaban BUMDes telah diverifikasi oleh Sistem Informasi Kementrian Desa, dan pengawasan BUMDes Permata dilakukan dengan turun langsung ke BUMDes Permata untuk memeriksa kinerjanya.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



1. Pengelolaan Laporan Keuangan: Dengan kualitas SDM yang baik, pengelolaan laporan keuangan akan lebih terjamin, baik dari sisi akurasi, waktu, dan transparansi.
2. Pengembangan BUMDes: SDM yang memiliki kualitas yang baik tidak hanya berpengaruh terhadap laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan BUMDes itu sendiri.
3. Pengelolaan Laporan Keuangan yang baik akan memberikan dampak langsung pada Pengembangan BUMDes, karena transparansi dan akuntabilitas yang dihasilkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap BUMDes.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitan yang digunakan ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan menggambarkan hasil temuan di lapangan baik dari segi teoritik maupun empirik.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari bulan Desember 2024 hingga Januari 2025.

C. Informan

Informan yang dipilih dalam penelitian ini diambil sesuai dengan tema dari penelitian ini sehingga dapat memberikan data dan informasi yang memadai dan akurat. Berikut ini merupakan daftar informan penelitian :

Table 3.1 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1	Nurrahman	Ketua BUMDes
2	Hernita Harun	Sekretaris BUMDes
3	Ayu	Bendahara BUMDes
4	Murni	Karyawan toko
6	Emmang	Masyarakat

Sumber. BUMDes Bottomallangga

D. Definisi Operasional Variabel

a. Laporan Keuangan : Dokumen yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas BUMDes yang disusun untuk periode tahun 2023. Laporan ini digunakan untuk menilai kinerja keuangan BUMDes, termasuk pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban. Kualitas laporan keuangan akan diukur berdasarkan kriteria seperti akurasi, kelengkapan, dan keterbukaan informasi.

b. Pengembangan BUMDes : Proses peningkatan kapasitas dan kinerja BUMDes yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan manajerial. Pengembangan ini dapat diukur melalui indikator seperti:

   a. Peningkatan pendapatan BUMDes.

   b. Diversifikasi usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

   c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program BUMDes.

   d. Efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki BUMDes.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data penelitian ini termasuk data primer, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi kepada seluruh responden penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan, perhatian, atau pengawasan terhadap suatu objek. Metode pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengumpulan informasi atau data dengan cara mengamati subjek dan objek penelitian secara cermat, teliti, dan sistematis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan metode observasi non-partisipan, yaitu di mana peneliti berperan sebagai pihak luar yang tidak terlibat langsung dengan kelompok subjek yang diamati, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana BUMDes. Peneliti mengamati secara langsung laporan keuangan dan pengembangan BUMDes Bottomallangga, dengan panduan dari ketua, bendahara, dan pengurus BUMDes Bottomallangga.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara terdiri dari wawancara mendalam dan wawancara bertahap. Wawancara mendalam umumnya adalah proses untuk memperoleh informasi guna tujuan penelitian melalui tanya jawab tatap muka antara pewawancara dan informan, dengan atau tanpa pedoman wawancara. Dalam wawancara ini, pewawancara dan informan biasanya terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, sehingga kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatan pewawancara dalam kehidupan informan. Sementara itu, wawancara bertahap cenderung lebih formal dan sistematis dibandingkan wawancara mendalam, namun masih jauh lebih informal dan kurang sistematis dibandingkan dengan wawancara yang sepenuhnya sistematik. Wawancara terarah dilakukan secara bebas dan mendalam, meskipun kebebasan tersebut tetap terfokus pada pokok permasalahan yang ditanyakan. Dalam wawancara bertahap, pewawancara tidak perlu terlibat langsung dalam kehidupan sosial informan. Pewawancara dapat hadir secara terbuka atau tersembunyi, memungkinkan mereka untuk mempelajari objek penelitian dengan lebih leluasa, menganalisis hasil wawancara, dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Wawancara yang dilakukan secara medalam dan bertahap oleh pewawancara ini. Wawancara dilakukan dengan mendapatkan permasalahan yang diambil dalam penelitian

sehingga bisa mendapat informan yang akurat dari si informan. Dengan mengadakan wawancara diharapkan bisa mendapatkan juga fakta dari informan sehingga dapat digunaklan untuk bahan penulisan penelitian, terutama fakta tentang kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan pengembangan BUMDes. Wawancara dilakukan dengan kepala desa, Ketua BUMDes Bottomallangga, Sekretaris, Bendahara, serta masyarakat Desa BUMDes Bottomallangga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti penelitian serta mendokumentasikan kegiatan dalam proses pembuatan laporan keuangan dan pengembangan BUMDes Bottomallangga, guna mengetahui penerapan akuntansi dalam laporan keuangannya. Dokumentasi ini mencakup foto-foto yang diambil selama sesi wawancara dengan pelaksana keuangan di BUMDes Bottomallangga, foto laporan keuangan BUMDes Bottomallangga, serta foto-foto yang menggambarkan berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan di BUMDes Bottomallangga.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama yang diantaranya yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Mile dan Huberman, metode penelitian ini termasuk metode penelitian yang sering

digunakan dalam penelitian kualitatif. Mereka mengembangkan model analisis data yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*)**

   Reduksi data adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang terkumpul dari lapangan. Pada tahap ini, data yang banyak dan beragam akan disaring, diorganisir, dan disusun untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan, pengelompokkan, dan penghapusan data yang tidak penting. Dengan kata lain, ini adalah proses untuk menyaring informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display)*

   Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Tujuan dari penyajiandata adalah untuk mengorganisir data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai format, seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi, tergantung pada jenis data dan tujuan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau informasi penting lainnya yang dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing)*

Tahap ini adalah proses menginterpretasi data dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara menganalisis pola-pola yang muncul dari data yang telah disajikan dan mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan ini sering kali bersifat sementara pada awalnya dan bisa diperbaiki atau diperbarui seiring dengan berjalannya penelitian, terutama ketika peneliti menemukan data baru.

Ketiga langkah ini tidak selalu dilakukan secara berurutan, karena proses analisis data dalam penelitian kualitatif seringkali bersifat iteratif. Artinya, peneliti bisa saja melakukan pengulangan antar tahapan tersebut sepanjang penelitian berlangsung.

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah BUMDes Bottomallangga

Botto Mallangga adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 23,75 km2. Desa ini dihuni oleh sekitar lima ratus hingga tujuh ratus kepala rumah tangga yang tersebar di enam dusun, yaitu Dusun Mallangga, Dusun Cakke, Dusun Kadeppe, Dusun Salusawah, Dususn Sarassang, dan Dusun Jati.

BUMDes Bottomallangga, yang didirikan pada tahun 2019. Pada awalnya, desa ini mendirikan unit usaha pertama berupa usaha penyewaan kursi yang dilanjut dengan mendirikan usaha simpan pinjam, namun usaha simpan pinjam hanya bertahan beberapa bulan saja lalu dihentikan. Unit usaha ketiga yaitu toko grosir yang diberikan nama Toko Grosis Sarassang. Unit usaha-usaha ini didirikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu dan sesuai dengan hasil kesepakatan saat rapat atau musyawarah.

Meskipun menghadapi tantangan, BUMDes Bottomallangga tetap berusaha mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes di desa ini mencerminkan upaya masyarakat untuk memberdayakan diri sendiri dan mengelola sumber daya desa secara mandiri.

B. Perkembangan Bumdes

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga menggambarkan sebuah dinamika yang cukup kompleks, di mana meskipun telah ada usaha-usaha yang berdiri, tantangan dan perubahan zaman membuat usaha tersebut mengalami penurunan kinerja.

Pengembangan SDM menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh BUMDes Bottomallangga adalah kurangnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terampil dalam mengelola usaha ini. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, pengelola BUMDes membutuhkan keterampilan yang lebih luas, termasuk dalam pemasaran digital, manajemen keuangan, dan pengelolaan risiko.

Toko grosir yang awalnya berkembang pesat karena lokasi strategis dan permintaan pasar yang tinggi, kini mengalami penurunan.

Keputusan untuk menghentikan usaha simpan pinjam karena tingkat pembayaran pinjaman yang rendah menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko dan evaluasi yang lebih cermat dalam memilih jenis usaha.

Unit usaha penyewaan kursi juga mengalami penurunan, terutama karena munculnya pesaing-pesaing baru. Hal ini menandakan bahwa usaha BUMDes harus lebih adaptif dengan situasi pasar yang terus berkembang.

C. Struktur BUMDes Bottomallangga

Struktur BUMDes umumnya terdiri dari beberapa komponen utama sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

   Ini adalah forum tertinggi dalam BUMDes yang terdiri dari pengelola BUMDes dan warga desa, yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan terkait BUMDes.

2. Pengurus BUMDes

   Ketua BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) biasanya menjabat sebagai **Direktur Utama** atau **Pimpinan BUMDes,** yang dipilih oleh masyarakat desa atau berdasarkan hasil musyawarah desa. Ada beberapa tugas ketua BUMDes yaitu :

   a. Memimpin seluruh kegiatan dan operasional BUMDes.
   b. Mengambil keputusan strategis yang berdampak pada keberlanjutan dan pengembangan BUMDes.
   c. Menjadi wakil BUMDes dalam berhubungan dengan pihak luar, seperti pemerintah, investor, dan lembaga keuangan.
   d. Menyusun kebijakan umum terkait pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes.

   Ketua BUMDes juga memiliki beberapa fungsi yaitu :

   a. Fungsi **Kepemimpinan**: Mengarahkan dan memberi motivasi kepada seluruh pengurus dan staf BUMDes.

b. Fungsi **representasi:** Mewakili BUMDes dalam forum resmi dan acara terkait.
c. Fungsi **pengambilan keputusan**: Mengambil keputusan penting terkait arah kebijakan dan pengembangan usaha.

Sekretaris BUMDes adalah salah satu posisi penting dalam struktur organisasi BUMDes yang bertanggung jawab atas berbagai tugas administrasi dan dokumentasi. Sekretaris memiliki beberapa tugas yaitu :

a. Menyusun dan mendokumentasikan semua administrasi BUMDes, termasuk surat menyurat, notulen rapat, dan laporan kegiatan.
b. Menyusun agenda rapat dan mengkoordinasikan jadwal rapat pengurus.
c. Mengelola arsip dan data penting terkait operasional dan kegiatan BUMDes.

Adapun beberapa fungsi sekretaris BUMDes yaitu :

a. Fungsi administrasi: Mengatur semua aspek administratif yang mendukung kelancaran operasional BUMDes.
b. Fungsi komunikasi: Menjadi penghubung antara pengurus dengan anggota atau pihak terkait lainnya.
c. Fungsi documentasi: Menyimpan semua dokumen penting dan memastikan semuanya terorganisir dengan baik.

Bendahara BUMDes adalah posisi yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan BUMDes, termasuk dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengawasan aliran dana yang masuk dan keluar. Beberapa tugas bendahara yaitu :

a. Mengelola keuangan BUMDes, termasuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran.
b. Menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk dipresentasikan dalam rapat anggota.
c. Mengelola anggaran dan memastikan pengeluaran sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.
d. Mengawasi arus kas dan memastikan keuangan BUMDes sehat dan transparan.

Adapun beberapa fungsi bendahara yaitu :

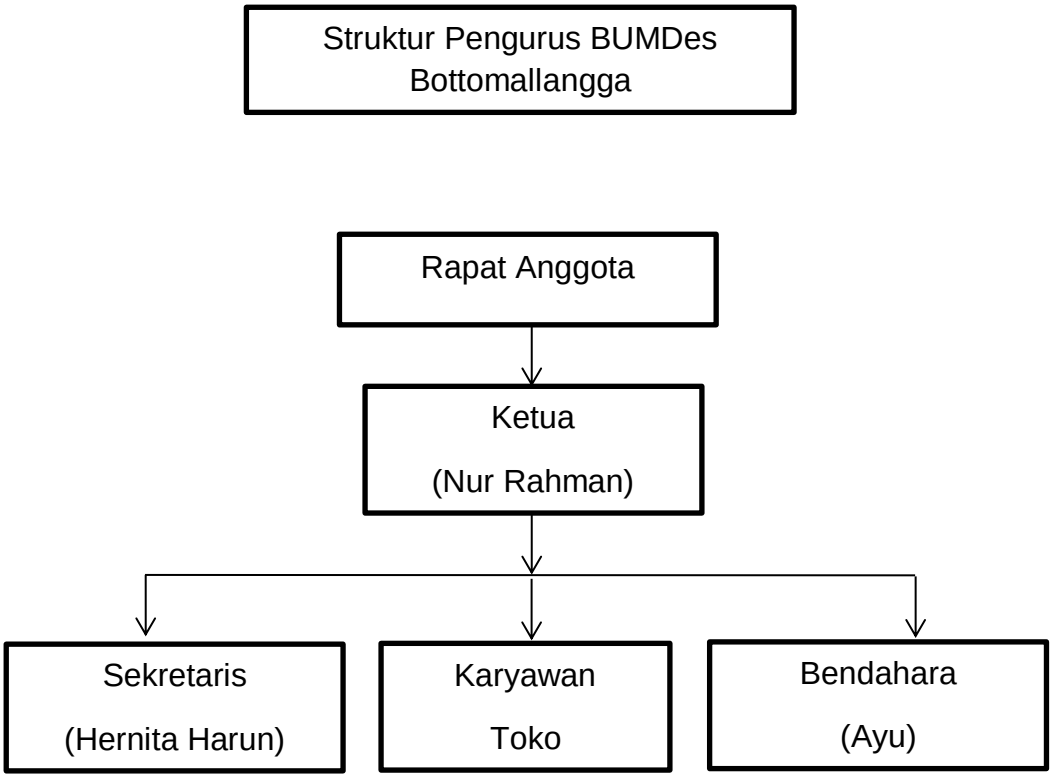
a. Fungsi **keuangan:** Menyusun dan mengawasi anggaran serta laporan keuangan BUMDes.
b. Fungsi **transparansi:** Menjamin agar pengelolaan dana BUMDes dilakukan secara transparan dan akuntabel.
c. Fungsi **pengendalian:** Memastikan keuangan BUMDes digunakan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang berlaku.

2. Karyawan BUMDes

BUMDes juga dapat merekrut tenaga kerja untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Karyawan ini bisa berasal

dari warga desa atau luar desa yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Gambar 4.1
STRUKTUR Pengurus BUMDes Bottomallangga



BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam temuan-temuan yang ada di lapangan, baik dari perspektif teoritis maupun empiris. Fokus utama penelitian ini adalah memberikan penjelasan rinci mengenai kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan serta proses pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, peneliti berusaha menggali dan memahami peran serta kinerja SDM dalam konteks tersebut, serta bagaimana kontribusi mereka terhadap kemajuan dan pengelolaan BUMDes.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berupa penjelasan-penjelasan mendalam terkait dengan kualitas SDM dalam hal pengelolaan laporan keuangan serta perkembangan yang terjadi pada BUMDes Bottomallangga. Data ini dikumpulkan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pengelolaan BUMDes serta peran SDM dalam hal tersebut.

Untuk memperoleh data kualitatif yang akurat, pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 informan yang telah dipilih secara purposive, yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilaksanakan secara langsung, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam. Dalam wawancara, peneliti mengumpulkan data yang mencakup beberapa aspek, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir informan, serta pemahaman dan pengalaman mereka dalam pengelolaan laporan keuangan dan pengembangan BUMDes. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kualitas SDM dan pengembangan BUMDes Bottomallangga.

Potensi sumber daya manusia Desa Bottomallangga masih sangat minim, dengan tingkat pendidikan berdasarkan hasil rekapan data dasar penduduk bersarkan tingkat pendidikan Desa Bottomallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bottomallangga

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD/Sederajat	586 Jiwa
2.	SD/Sederajat	616 Jiwa
3.	SLTP	540 Jiwa
4.	SLTA	401 Jiwa
5.	D-1/D-2	3 Jiwa
6.	D-3	6 Jiwa
7.	S-1	20 Jiwa
8.	S-2	2 Jiwa
9.	Tidak / Belum Sekolah	540 Jiwa

Sumber: Profil Desa Bottomallangga

1) Mata Pencaharian

Tabel 5.2

Mata Pencaharian Berdasarkan Pekerjaan Bottomallangga

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.396 Jiwa
2.	Pelajar/Mahasiswa	144 Jiwa
3.	Ibu Rumah Tangga	595 Jiwa
4.	Pedagang	25 Jiwa
5.	Pegawai Swasta	57 Jiwa
6.	Pensiunan	16 Jiwa
7.	Guru/Dosen	33 Jiwa
8.	Wiraswasta/Industri	45 Jiwa
9.	TNI/POLRI	1 Jiwa
11.	Buruh Tani/Buruh Harian Lepas	75 Jiwa
12.	Bidan/Tenaga Medis Lain	1 Jiwa
13.	Pegawai Negeri Sipil	57 Jiwa

14.	Belum Kerja/Tidak Bekerja	264 Jiwa
15.	Lainnya	4 Jiwa

Sumber : Profil Desa Bottomallangga

Data di atas dapat menunjukan jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan Desa Bottomallangga Kecamatan Maiwa. Yang mana data tersebut menunjukan bahwa jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi pekerjaan penduduk Desa Bottomallangga.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang dilaksanakan dengan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga dan masyarakat di sekitar Bottomallangga. Berikut adalah informasi mengenai identitas informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini :

a. Data Informan

Table 5.3 Data Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Nurrahman	Ketua BUMDes
2.	Hernita Harun	Sekretaris BUMDes
3.	Ayu	Bendahara BUMDes
4.	Murni	Karyawan toko
5.	Emmang	Masyarakat

Sumber. BUMDes Bottomallangga

b. Jenis Kelamin

Penelitian ini melibatkan enam informan, yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Rincian jumlah responden dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel 5.4 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Total
1.	Laki-Laki	2 Orang
2.	Perempuan	3 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber. BUMDes Bottomallangga

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah informan sebanyak 5 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

c. Usia Informan

Adapun usia informan dalam penelitian ini adalah antara 33–52 tahun dengan melihat usia tersebut merupakan usia produktif. Adapun kualifikasi usia informan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.5 Usia Informan

No	Usia Responden	Total
1	33 Tahun	1 Orang
2	35 Tahun	1 Orang
3	42 Tahun	1 Orang
4	49 Tahun	1 Orang
5	52 Tahun	1 Orang

Sumber. BUMDes Bottomallangga

Tabel 5.2 memperlihatkan bahwa usia informan bervariasi, di antaranya terdapat 1 informan berusia 33 tahun, 1 informan berusia 35 tahun, 1 informan berusia 42 tahun, 1 informan berusia 49 tahun, 1 informan berusia 50 tahun. Dengan demikian, total informan yang terlibat dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga adalah sebanyak 5 orang.

d. Pendidikan Terakhir Informan

Kategori pendidikan dan pengalaman Informan sangat berpengaruh terhadap keakuratan jawaban informan atas pertanyaan yang penulis berikan. Adapun pendidikan terakhir informan dalam penelitian ini terdiri dari SLTA (SMA) dan S1 seperti terdapat pada tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.6 Pendidikan Terakhir Informan

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Total
1	SLTA (SMA)	4 Orang
2	S1	1 Orang

Sumber. BUMDes Bottomallangga

Tabel pendidikan terakhir informan menunjukkan bahwa jumlah informan yang pendidikan terakhir SLTA sebanyak 4 Orang dan jenjang pendidikan terakhir S1 sebanyak 1 Orang.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). SDM yang berkualitas dapat memberikan dampak positif langsung pada berbagai aspek operasional dan strategis BUMDes. Dengan meningkatkan kualitas SDM, anggota BUMDes dapat mengelola usaha dengan lebih efisien, melakukan perencanaan yang lebih matang, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, serta memanfaatkan peluang pasar dengan lebih bijak (Azhari et al., 2023).

Dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diperlukan tahapan manajerial yang strategis untuk memastikan pengelolaan yang efektif pada BUMDes, agar dapat merancang rencana usaha yang tepat untuk masa depan. Untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan BUMDes di Desa Bottomallangga, indikator yang digunakan sebagai acuan adalah dengan mengkaji laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan keuangan BUMDes harus membuat neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas lapopran keuangan.

Untuk menyusun laporan keuanganBUMDes bisa menggunakan Sistem Aplikasi Akuntansi BUMDes (SAAB).

Namun hal-hal diatas belum terpenuhi dalam laporan keuangan BUMDes Bottomallangga karena pemahaman pengelola BUMDes Bottomallangga terkait pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi masih memerlukan peningkatan.

Untuk lebih memahami bagaimana kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan pengembangan BUMDes Bottomallangga maka penulis melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan SDM dan pengembangan BUMDes. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis seperti pada tabel 5.5 dibawah ini :

Tabel 5.7
Hasil Wawancara Dengan Kepala BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana latar belakang berdirinya BUMDes Bottomallangga?	Berdasarkan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyrakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan.

2.	Apa tujuan berdirinya BUMDes Bottomallangga?	Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaran pemerintah dan meingkatkan pendapatan melalui berbagai usaha ekonomi masyarakat yang sesuai kebutuhan dan potensi desa dengan unit usaha yang dimiliki BUMDes serta berharap dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.
3.	Apakah ada manfaat dari berdirinya BUMDes?	Jelas ada, Karena BUMDes Bottomallangga menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat membantu perekenomian dan pendapatan desa.
4.	Apa saja program usaha yang ditangani BUMDes Bottomallangga?	Ada dua unit usaha yang ditangani yaitu unit Toko Grosir Sarassang dan unit Prenyewaan Kursi.
5.	Dari mana asal modal BUMDes Bottomallangga?	Modal awal BUMDes Bottomallangga berasal dari pernyataan modal desa yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
6.	Bagaimana system akuntansi yang berjalan di BUMDes Bottomallangga?	System akuntansi di BUMDes masih belum berjalan sepenuhnya.

6.	Pertanggungjawaban laporan keuangan BUMDes Bottomallangga diserahkan kepada pihak mana?	Diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bottomallangga.

Tabel 5.8
Hasil Wawancara Dengan Bendahara BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Pedoman apa yang anda gunakan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Bottomallangga?	Penyusunan laporan keuangan hanya mencatat laporan penjualan dan pengeluaran.
2.	Bagaimana system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes Bottomallangga?	Dalam system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes langsung melaporkan pendapatan dan pengeluaran pada saat pelaporan priode tertentu.
3.	Bagaimana jika system akuntansi yang sudah ada sekarang ini pada BUMDes Bottomallangga diganti dengan system akuntansi yang berlaku umum dan sesuai ketentuan pemeritah?	Jika system akuntansi yang kami pakai dan harus diganti dengan system akuntansi yang berlaku umum atau yang sesuai dengan peraturan pemerintah kami akan menerima dan menjalankan system tersebut. Dikarnakan salah satu kendala kami dalam menjalankan unit usaha BUM Desa Mario Marennu yaitu kurangnya pemahaman akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan.

4.	Apakah ada kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan?	Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan yaitu kurangnya pengetahuan tentang penerapan akuntansi.

Tabel 5.9
Hasil Wawancara Dengan Karyawan Toko Grosir BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana perkembangan unit usaha yang didirikan BUMDes Bottomallangga hingga saat ini ?	Saat usaha penyewaan kursi didirikan masyarakat memberikan respon positif dengan membantu pengadaan usaha tersebut. Penyewa kursi di BUMDes kami cukup bertambah setiap bulan, bahakan ada penyewa yang berasal dari desa lain. Namun seiring bertambahnya pesaing, penyewa turun secara signifikan, beberapa kursi rusak, dan biaya sewa yang tidak dibayarkan menyebabkan usaha ini memudar. Untuk usaha simpan pinjam ini hanya berjalan sebentar karena pinjaman yang tidak dibayar dan penagihannya sulit. Usaha toko grosir berjalan dengan lancar karena pada awalnya di desa ini tidak ada toko grosir dan toko grosir sarassang didirikan ditempat yang strategis.

		Namun seiring waktu muncul pesaing disekitar yang menjual dengan harga yang lebih murah menyebabkan toko grosir sarassang sepi bahakan tutup untuk sementara waktu.

Tabel 5.10
Hasil Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah para pengelola laporan keuangan sudah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus di bidang akuntansi dan manajemen keuangan?	Belum ada pelatihan atau pendidikan khusus terkait bidang akuntansi di BUMDes Bottomallangga.
2.	Apakah BUMDes Bottomallangga menggunakan software atau sistem akuntansi tertentu dalam proses pembuatan laporan keuangan?	Dalam pembuatan laporan keuangan belum menggunakan software atau sistem akuntansi karena dalam system pencatatan pelaporan keuangan BUMDes langsung melaporkan pendapatan dan pengeluaran.

Table 5.11
Hasil Wawancara Dengan Mayarakat Sekitar BUMDes

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah BUMDes mendirikan unit usaha sesuai dengan kebutuhan	Unit usaha BUMDes Bottomallangga saat awal didirikan sesuai dengan

	masyarakat? Apa saja unit usaha itu?	kebutuhan msyarakat dan hasi rapat. Unit usaha yang didirikan yang pertama itu usaha penyewaan kursi, lalu simpan pinjam, dan Toko Grosir Sarassang.
2.	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan unit usaha BUMDes Bottomallangga?	Masyarakat antusias membantu pembangunan unit usaha BUMDes.

Sumber : wawancara penulis dengan informan BUMDes Bottomallangga

Hasil wawancara terhadap 5 informan yang terdiri dari pegawai dan masyarakat sekitar BUMDes Bottomallangga yang terlibat langsung dalam pengembangan BUMDes menunjukkan berbagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Analisis terhadap laporan keuangan BUMDes Bottomallangga yang dihasilkan setiap bulannya atau setiap tahunnya belum bisa dikatakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang cocok untuk BUMDes yaitu SAK ETAP.

Berdasarkan observasi langsung terhadap BUMDes Bottomallangga, ada beberapa alasan lainnya yang menyebabkan tidak ada penyususnan laporan keuangan oleh BUMDes Bottomallangga sehingga dapat menyebabkan

kemampuan menyusun laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja mereka. Adapun alasanya yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang berhubungan tentang penerapan SAK ETAP.
b. Kurangnya perhatian pengelola akuntansi.
c. Menurutnya dalam penerapan SAK ETAP tidak begitu berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja mereka.
d. Pihak BUMDes Bottomallangga lebih mengutamakan pengalaman peningkatan kinerja dibandingkan membuat laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan SAK ETAP sebagai landasan penulisan laporan keuangan di BUMDes Bottomallangga. Menggunakan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik) sebagai landasan penulisan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beberapa alasan yang sangat relevan, mengigat sifat dan kebutuhan organisasi BUMDes. Berikut adalah beberapa alasan utama:

a. Kesederhanaan dan Kemudahan Penerapan

   BUMDes biasanya merupakan entitas yang lebih kecil, dengan sumber daya yang terbatas dan operasional yang tidak sebesar perusahaan besar. SAK ETAP dirancang

khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti BUMDes, sehingga menggunakan standar ini memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana dan tidak memerlukan prosedur akuntansi yang rumit. Hal ini juga memudahkan bagi pengelola BUMDes yang mungkin tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat.

b. Biaya Penyusunan yang Lebih Rendah

Karena standar akuntansi ini lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan laporan keuangan menjadi lebih terjangkau. BUMDes dapat mengalokasikan dana yang terbatas mereka untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk mengikutu standar akuntansi yang lebih kompleks seperti IFRS.

c. Memenuhi Kebutuhan Pelaporan yang Transparan dan Akuntabel

Meskipun BUMDes bukan entitas yang terdaftar di bursa saham atau memiliki akuntabilitas publik, tetap diperlukan transparansi dalam pengelolaan keuangan untuk membangun kepercayaan masyarakat desa dan pemerintah. SAK ETAP memberikan kerangka yang cukup jelas bagi BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang akurat

dan dapat dipahami oleh pihak terkait, seperti pemerintah desa, warga, dan lembaga keuangan yang mungkin terlibat.

d. Penyederhanaan Proses Pelaporan untuk Entitas yang Tidak Terlalu Kompleks

BUMDes umumnya memiliki struktur yang tidak sekompleks perusahaan besar dan kegiatan usahanya lebih sederhana. Dengan menggunakan SAK ETAP, laporan keuangan yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan tingkat kompleksitas operasional BUMDes. Hal ini menjadikan proses pelaporan lebih efisien dan tidak memberatkan.

e. Mendukung Pengelolaan Keuangan yang Baik

Menggunakan SAK ETAP dapat membantu BUMDes dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, karena standar ini mengedepankan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang relevan, seperti kewajaran**,** konsistensi, dan pruden. Ini penting bagi BUMDes untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan informasi keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya.

f. Peningkatan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

BUMDes merupakan bagian dari entitas yang dikelola oleh pemerintah desa, dan pengelolaannya perlu

akuntabilitas yang jelas. Dengan mengacu pada SAK ETAP**,** BUMDes dapat menunjukkan bahwa mereka mengelola keuangan dengan transparansi dan profesionalisme, yang akan memudahkan dalam pengawasan oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat desa dan pemerintah.

g. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Beberapa peraturan pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangan desa juga mengharuskan BUMDes untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. **SAK ETAP** adalah standar yang secara khusus ditujukan untuk entitas yang tidak berorientasi pada keuntungan atau yang berukuran kecil, sehingga sangat sesuai untuk digunakan oleh BUMDes sesuai dengan regulasi yang ada.

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah suatu standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan. Tujuan utama SAK ETAP adalah untuk memberikan panduan yang lebih sederhana dalam penyusunan laporan keuangan bagi entitas-entitas yang lebih kecil, agar lebih mudah dipahami dan

diterapkan, namun tetap mempertahankan kualitas informasi keuangan yang relevan.

SAK ETAP ini juga dirancang agar tidak terlalu rumit dan lebih sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas entitas kecil yang umumnya tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih kompleks, seperti SAK Umum atau IFRS (International Financial Reporting Standards).

Membuat laporan keuangan dengan landasan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) relatif lebih sederhana dibandingkan dengan standar akuntansi yang lebih kompleks. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP:

a. Persiapkan Neraca *(Balance Sheet)*
   Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dalam SAK ETAP, neraca disusun dengan dua bagian utama, yaitu: Aset, Kewajiban (*Liabilitas),* dan Ekuitas.

b. Susun Laporan Laba Rugi (*Income Statement)*
   Laporan laba rugi menunjukkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini melaporkan pendapatan dan biaya untuk menghasilkan laba atau rugi. Berdasarkan

SAK ETAP, laporan laba rugi disusun sebagai berikut: Pendapatan, Beban, Laba/Rugi.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (statement of changes in equity)
Laporan ini disusun setelah neraca lajur dan juga laporan laba rugi sudah ada. Karena ketika membuat laporan ekuitas, kita membutuhkan laporan lajur laporan dan laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perubahan modal.

d. Susun Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement)*
Laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas yang diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian: Arus Kas dari Aktivasi Operasional, Arus Kas dari Aktivasi Investasi, dan Arus Kas dari Pendanaan.

e. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting untuk menjelaskan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memberikan rincian tambahan yang tidak terlihat dalam laporan utama. Hal ini bisa meliputi penjelasan mengenai kebijakan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam hasil wawancara didapatkan bahwa BUMDes Bottomallangga belum menerapkan penerapan SAK ETAP sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ketua BUMDes Bottomallangga Bapak Nurrahman bahwa dalam penerapan

akuntansi di BUMDes Bottomallangga belum ada. Hal tersebut dikatakan juga oleh Bendahara BUMDes Bottomallangga Ibu Ayu bahwa dalam penerapan akuntansi di BUMDes Bottomallangga hanya ada dua pencatatan yaitu penjualan dan pembelian. Penjualan dikategorikan sebagai pendapatan BUMDes sedangkan untuk pembelian dikategorikan sebagai pengeluaran BUMDes Bottomallangga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan penerapan akuntansi. Dalam penerapan akuntansi setidaknya harus melaporkan atau menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuagan. Dalam menentukan laba usaha BUMDes Bottomallangga hanya melakukan pengurangan dari hasil pejualan dikurangi dengan hasil pembelian maka didapatkan berapa laba atau keuntungan yang didapatkan.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa BUMDes Bottomallangga tidak melakukan pencatatan atau jurnal sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP.

Salah satu software yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan yaitu Mekari Jurnal. Mekari Jurnal menawarkan sistem akuntansi yang terintegrasi, memungkinkan pemilik bisnis untuk mencatat semua transaksi secara otomatis. Mekari Jurnal dirancang dengan

antarmuka yang *user friendly,* sehingga mudah digunakan bahkan oleh mereka yang tidak memiliki dasar Akuntansi. Mekari Jurnal menyediakan berbagai laporan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Laporan-laporan ini memuat laporan laba rugi, necara, arus kas, dan laporan perpajakan.

Terlepas dari pengelola laporan keuangan yang belum memahami penerapan sistem akuntansi yang tepat untuk BUMDes Bottomallangga dan unit-unit usaha BUMDes yang mengalami penurunan, BUMDes Bottomallangga memiliki beberapa peluang usaha yang sangat berpotensi, diantaranya :

a) Mengubah Toko Grosir Sarassang menjadi toko distributor

Distributor memiliki berbagai peran krusial dalam rantai pasokan. Pertama, mereka menghubungkan produsen dengan pengecer dan konsumen akhir, memastikan harga yang kompetitif dan suplai yang konsisten. Kedua, distributor memberikan nilai tambah dengan menyediakan dukungan pemasaran dan layanan pelanggan, serta mengangkut produk dengan biaya yang diintegrasikan dalam harga jual.

Mereka juga bertanggung jawab untuk menginformasikan nilai dan kualitas produk kepada konsumen, mengadakan promosi, dan mengelola inventaris untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Oleh

karena itu, pemilik bisnis independen yang menjadi distributor harus memiliki kemampuan dalam negosiasi, pemahaman pasar, serta strategi pemasaran yang inovatif.

Menjadi distributor menawarkan berbagai manfaat yang dapat memberikan dampak positif pada bisnis Anda. Beberapa di antaranya termasuk mendapatkan harga produk yang lebih murah, dukungan langsung dari perusahaan, dan fokus bisnis yang lebih tinggi dan tepat sasaran.

Toko distributor yang didirikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan pemasaran tidak hanya secara offline tetapo juga secara online dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk promosi agar toko distributor BUMDes Bottomallangga dikenal secara luas.

b) Mengembangkan Usaha Kerajinan Tangan

Masyarakat desa dapat mengembangkan usaha kreatif, seperti kerajinan tangan atau produk-produk unik lainnya. BUMDes dapat membantu dalam pemasaran produk-produk tersebut agar lebih dikenal dan mendapatkan konsumen yang lebih banyak.

Kerajinan tangan yang sudah ada di desa Bottomallangga yaitu pembuatan parang, hal ini harus dikembangkan dan dipasarkan lebih luas.

c) UMKM Gula Aren

Banyak masyarakat bottomallangga yang memproduksi dan menjual gula aren dalam bentuk persegi panjang. Dengan melihat kondisi ini, BUMDes Bottomallangga memiliki peluang untuk membuat UMKM gula aren yang mengolah dan memasarkan gula aren.

BUMDes Bottomallangga dapat mengolah gula aren menjadi produk yang lebih menarik yaitu gula aren bubuk (*Palm Sugar)* dan gula aren cair yang dikemas secara menarik.

2. Analisis Data Hasil Penelitian

Wawancara dilakukan penulis untuk mencari informasi mengenai kualitas SDM pengelola laporan keuangan dan pengembangan BUMDes di BUMDes Bottomallangga. Analisis deskriptif komparatif yaitu bentuk analisis yang membandingkan antara dua jenis objek untuk mencari kesamaan dan perbedaan kedua objek tersebut. Peneliti melakukan analisis data menggunakan tiga teknik dalam metode analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis tersebut sebagai berikut :

1. **Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilahan, penyaringan, dan pengelompokkan data yang diperoleh selama wawancara untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang masalah penelitian.

a. **Kualitas SDM dalam Pengelolaan Keuangan BUMDes**: Data wawancara menunjukkan bahwa para pengelola BUMDes belum memiliki pelatihan atau pendidikan khusus terkait akuntansi dan manajemen keuangan, sehingga mereka belum mampu menerapkan standar akuntansi yang sesuai (SAK ETAP). Misalnya, bendahara BUMDes hanya mencatat penjualan dan pengeluaran tanpa menggunakan sistem akuntansi yang lebih formal.

b. **Kurangnya Sistem Akuntansi yang Memadai**: Berdasarkan wawancara dengan sekretaris dan ketua BUMDes, sistem akuntansi yang digunakan di BUMDes Bottomallangga belum memenuhi standar yang diperlukan, seperti penggunaan software atau sistem akuntansi yang lebih tepat.

c. **Faktor Eksternal dan Intern BUMDes**: Beberapa masalah juga diungkapkan, seperti keterbatasan modal, keberadaan pesaing yang semakin banyak, dan sulitnya pengumpulan pembayaran sewa yang berdampak pada pengelolaan BUMDes yang tidak optimal.

d. Kinerja dan perkembangan unit usaha BUMDes**:** Hasil wawancara menunjukkan penurunan dalam pengembangan usaha BUMDes, meskipun pada awalnya usaha tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

2. **Penyajian Data**

Penyajian data berfokus pada cara data disajikan secara terstruktur untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

a.Tabel Wawancara: Peneliti menyusun data wawancara secara terstruktur dalam tabel yang mencakup jawaban dari berbagai informan terkait dengan pertanyaan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, serta kendala yang dihadapi oleh BUMDes dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan unit usaha.

b. Identifikasi Kinerja SDM: Data menunjukkan bahwa meskipun BUMDes Bottomallangga berusaha menjalankan beberapa unit usaha, seperti toko grosir dan penyewaan kursi, kendala utama terletak pada kurangnya pemahaman SDM dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan berfokus pada analisis mendalam terhadap data yang telah direduksi dan disajikan untuk menarik pemahaman tentang fenomena yang diteliti.

a. **Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Akuntansi**: Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes Bottomallangga belum memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi dan sistem akuntansi yang seharusnya diterapkan (SAK ETAP). Hal ini menyebabkan pengelolaan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
b. **Kualitas SDM sebagai Faktor Kunci dalam Pengelolaan BUMDes**: Kualitas SDM yang kurang memadai dalam hal akuntansi berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan. Hal ini menghambat kemampuan BUMDes dalam merencanakan keuangan secara lebih efisien dan transparan.
c. **Kendala dalam Pengelolaan Unit Usaha**: Meskipun terdapat usaha yang potensial, beberapa kendala eksternal, seperti banyaknya pesaing, serta masalah internal terkait pengelolaan keuangan, telah menghambat perkembangan usaha BUMDes Bottomallangga.
d. **Pentingnya Pelatihan dan Sistem Akuntansi yang Tepat**: Salah satu kesimpulan yang dapat ditarik adalah pentingnya pelatihan akuntansi bagi pengelola BUMDes serta penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan

standar yang berlaku, seperti SAK ETAP, agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih transparan dan efisien.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini menyoroti peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal. Penelitian dilakukan di BUMDes Bottomallangga, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, untuk menganalisis kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan usaha.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Bottomallangga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Pengelola BUMDes Bottomallangga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi, sehingga pencatatan keuangan hanya terbatas pada pencatatan pendapatan dan pengeluaran tanpa adanya sistem akuntansi yang terstruktur. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus bagi pengelola menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan BUMDes. Hal tersebut menunjukkan bahwa SDM pengelola laporan keuangan BUMDes Bottomallangga masih kurang memahami pencatatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

Dari segi pengembangan usaha, BUMDes Bottomallangga memiliki beberapa unit usaha, seperti toko grosir dan penyewaan kursi. Namun, unit usaha tersebut mengalami kendala dalam persaingan pasar dan keterbatasan modal, sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi desa. Keberlanjutan usaha juga terhambat oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan agar pengelolaan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih profesional dan sesuai standar. Selain itu, strategi pengembangan usaha yang lebih adaptif dan inovatif perlu diterapkan untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan perbaikan dalam aspek pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha, BUMDes Bottomallangga diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

BUMDes Bottomallangga memiliki beberapa peluang usaha yaitu mengembangkan Toko Grosir Sarassang menjadi Toko Distributor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan usaha kerajinan tangan dalam hal ini pembuatan parang, dan menjadi wadah masyarakat untuk memasarkan dan mengolah gula aren menjadi *palm sugar* dan gula aren cair yang dikemas dan dipromosikan dengan cara yang menarik.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bottomallangga, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola laporan keuangan masih agak terbatas, dengan kurangnya pemahaman mengenai akuntansi dan manajemen keuangan. Pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih sederhana, tanpa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Pengelolaan dan pengembangan usaha menghadapi kendala, di antaranya kurangnya pelatihan bagi pengelola, terbatasnya modal usaha, dan persaingan yang semakin ketat, sehingga unit usaha seperti toko grosir dan penyewaan kursi mengalami penurunan omzet. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, BUMDes Bottomallangga masih memiliki peluang untuk berkembang dan memiliki peluang usaha di bidang lainnya.

B. Saran

1. Saran untuk BUMDes
    a. Pengelola BUMDes perlu mendapatkan pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan agar dapat menyusun laporan

keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. BUMDes sebaiknya menerapkan Standar Akuntansi yang sesuai dalam pengelolaan keuangan BUMDes seperti SAK ETAP.

b. Untuk meningkatkan daya saing, BUMDes dapat mengembangkan unit usaha baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menerapkan strategi pemasaran digital.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

a. Mengingat penelitian ini menemukan bahwa BUMDes Bottomallangga belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai, penelitian berikutnya dapat lebih fokus pada penerapan dan evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di berbagai BUMDes untuk melihat efektivitas dan kendala dalam implementasinya.

b. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BUMDes, seperti strategi bisnis, kebijakan pemerintah, dukungan masyarakat, atau adopsi teknologi dalam operasional BUMDes.

c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara beberapa BUMDes di berbagai daerah guna mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan serta pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). Akuntansi Bumdes Di Desa Je'Nemadinging Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2), 137–142. https://doi.org/10.31334/jks.v3i2.1276.

Ana, A. T. R., & Ga, L. L. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan BUMDes (Studi kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, *9*(1), 62-72.

Arista, D., Satyanovi, V. A., Dwi, L., Rahmawati, A., & Hapsari, A. A. (2021). *KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI*. *4*(3).

Arifin, S. A., Inapty, B., & Astuti, B. R. D. (2022). Analisis implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan badan usaha milik desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *2*(3), 498-505.

Astri, F. (2021). Analisis Perkembangan BUMDes se Kabupaten Tolitoli. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *4*(2), 855-863.

Azhari, A., . Mustofa, M., Meisari, E. D., & Setia Anggarista, E. T. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *14*(2), 82–92. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3392

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2024). *Panduan Pengawasan Keuangan BUMDes*. Diakses dari https://www.bpkp.go.id

Desa, D. I., & Nibung, S. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa melalui bumdes di desa sugai nibung*. *5*(1), 49–61.

Di, B., Bengkayang, K., & Situmorang, D. M. (2020). *Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada*. *2*(1), 58–66.

Ekonomi, F., & Cendana, U. N. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)*. *9*(1), 62–72.

Harrison, W. T., & Horngren, C. T. (2021). *Financial Accounting* (11th ed.). Pearson Education.

Harrison, J., & Leitch, C. (2023). *Strategic Management for Business Success*. Routledge.

Hassan, M.K.(2022). "Financial Statement Transparency and Its Impact on Corporate Governance". *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 20(3), 325-340.

Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), 1–11. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1

Ivan, M., Wibowo, S., Nugrahesthy, A., & Hapsari, S. (2022). *Pengelolaan Keuangan BUMDes : Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa*. *9*(01).

Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), 1–11. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Laporan Tahunan Pengembangan BUMDes di Indonesia*. Diakses dari https://www.kemendesa.go.id

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Diakses dari https://www.kemendesa.go.id.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting* (16th ed.). Wiley.

Kraemer, L., & Slaughter, S. (2021). "Human Capital and Innovation: The Role of High-Quality Talent in Organizational Success". *Journal of Research*, 132, 325-336.

Lichtenstein, B. M. B., & Lyons, T. (2022). "Innovative Business Strategies in the Digital Age". *Journal of Business Strategy*, 43(2), 54-67.

Liu, W., Zhang, C., & Li, X. (2020). "Marketing Strategies for Business Growth in Emerging Markets". *Journal of International Marketing*, 28(4), 101-117.

McGrath, R. G. (2020). *The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuous Business Innovation*. Harvard Business Press.

Mekari. (2024). *Mekari Jurnal: Software Akuntansi untuk UMKM dan BUMDes.* Diakses dari https://www.mekari.com.

Miller, D., & Friesen, P. H. (2021). "Innovation and Corporate Growth". *Journal of Business Venturing*, 36(5), 849-864.

Nurmanti, L., & Suryana, Y. (2023). "Sustainability Practices in BUMDes for Long-Term Village Development". *Sustainability in Rural Communities*, 18(2), 118-131.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19/2017 tentang *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).*

Pradhana, R. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bontonompo Jaya Di Desa Bontonompo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).

Prasetyo, A., & Nawangsari, E. R. (2024). *Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Langgeng Jaya di Desa Gempol Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Pendahuluan Pembangunan nasional merupakan bentuk upaya pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh kehidupan bermasyarakat , berbangsa serta bernegara*. *5*(2). https://doi.org/10.53682/jpjsre.v5i2.9366

Rachman, I. (2020). "BUMDes: Empowering Local Economic Development". *International Journal of Rural Development*, 28(2), 151-164.

Rosmalita, N., & Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, *5*(2), 239-248.

Saputra, A. N., & Kusumastuti, R. (2023). Jurnal Ekonomi Akuntansi. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang*, *V*(Persediaan), 1–12. www.depkeu.com

Saputra, H. A. (2024). *Manajemen strategi pengembangan bumdes sebagai sarana penambahan dana desa di desa pandan wangi kecamatan jerowaru*. *2*(2), 182–199.

Sari, R. N. (2022). Analisis fungsi Perencanaan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Di Desa Tawangargo Kecamatan

Karangploso Kabupaten Malang). *Dialektika Publik*, 9–12. https://forum.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/6332%0Ahttps://forum.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/download/6332/2829

Salman, S., Iqbal, S., & Saeed, M. (2021). "Human Resource Development for Business Expansion: A Case Study Approach". *International Journal of Human Resource Management*, 32(3), 234-248.

Sanjaya, Y. (2022). "The Contribution of BUMDes to Local Infrastructure and Public Services". *Journal of Village Governance*, 11(4), 456-467.

Satriawan, T. (2021). "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(2), 112-128. Diakses dari https://garuda.ristekdikti.go.id

Setiawan, A. (2021). "BUMDes as a Driver of Village Development: Challenges and Opportunities". *Journal of Development Studies*, 19(3), 201-213.

Sholihat, W., & Corrina, F. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruh Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Sekecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. *SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan*, *9*(2), 198-213.

Siagian, A. O. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, *4*(1), 33-43.

Siahainenia, A. J. D., & Si, M. (2020). *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT JAMAK (MANAJEMEN & AKUNTANSI) Vol 03. No. 01, Juni 2020*. *03*(01), 197–216.

Shin, J. H. (2022). "Impact of Continuous Learning on Human Resource Development and Organizational Performance". *Journal of Human Resource Development*, 41(2), 115-130.

Shin, J. H., & Kim, S. J. (2021). "Work Experience and Its Influence on the Development of Professional Skills". *Journal of Career Development*, 48(3), 340-355.

Sharma, U. (2023). "The Role of Financial Reporting in Decision Making:A Contemporary Perspective". *Journal of Accounting and Finance*, 45(2), 104-118.

Smith, L. M. (2020). "Strategic Alliances and Business Expansion". *Journal of Business Research*, 138, 215-224.

Sutrisno, A., & Sari, R. (2022). "The Role of BUMDes in Empowering Village Economy: Case Study in Central Java". *Journal of Rural Economics and Development*, 15(1), 89-103.

Tariq, M., & Hossain, G. (2023). "Strategic Management in BUMDes: Overcoming the Challenges of Village Business Development". *Journal of Business and Rural Development*, 25(2), 234-247.

Tang, X., Li, X., & Zhao, S. (2020). "Measurement and Improvement of Human Resource Quality in the Digital Age". *International Journal of Human Resource Management*, 31(4), 527-544.

Teece, D. J. (2023). "Dynamic Capabilities and Strategic Management for Business Development". *Strategic Management Journal*, 44(1), 50-70.

Usaha, B., Desa, M., Di, B., & Kedungturi, D. (n.d.). *Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) di desa kedungturi kabupaten sidoarjo*. 57–68.

Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2022). *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment* (7th ed.). Cengage Learning.

Yoon, Y., & Lee, S. H. (2023). "Work-Life Balance and its Impact on Employee Well-being and Productivity". *Journal of Organizational Psychology*, 31(1), 45-62.

Zahir Accounting. (2024). *Zahir Accounting: Software Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah.* Diakses dari https://www.zahironline.com

Zhang, L., & Xie, Z. (2022). "Key Performance Indicators for Business Development Success". *Journal of Business Analytics*, 19(1), 78-92.